



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD
DAN BIAYA AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu penyediaan kredit anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 perlu disempurnakan dan ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, asas kepatutan, asas kewajaran dan transparansi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD DAN BIAYA AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang meliputi Walikota, Wakil Walikota.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai/guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
8. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
11. Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah, adalah perjalanan dinas di dalam daerah atau keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya tidak lebih dari 5 (lima) kilometer dari batas daerah untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Daerah, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Keluar Daerah, adalah perjalanan dinas keluar dari Daerah yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Daerah untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada pejabat negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas perjalanan dinas keluar kota yang terdiri dari uang saku, uang makan dan transport lokal kecuali pejabat negara diberikan uang saku dan transport lokal.
15. Uang akomodasi adalah uang yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang terdiri dari transport, uang harian dan/atau penginapan.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Uang representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada pejabat negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Eselon IIB.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
22. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan PD adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
23. Tempat kedudukan adalah tempat perangkat daerah berada.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA SKPD maupun DPA SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi yang dibebankan pada APBD.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD ;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah ; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah ;
 - b. perjalanan dinas keluar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas yang terkait dengan tugas-tugas PD sesuai bidang kewenangannya di wilayah daerah.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan ;

- b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
- c. untuk kepentingan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS ;
- d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas atau karena melaksanakan tugas ;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan ;
- f. menjemput jenazah pejabat negara, DPRD, PNS, PTT, Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
- g. mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara, DPRD, PNS, PTT dan Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman ;
- h. dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan jabatannya dan/atau tugas dan fungsinya oleh aparat penegak hukum di luar tempat kedudukan.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD untuk kepentingan perjalanan dinas, dilaksanakan secara berjenjang sesuai kedudukannya dalam jabatan yaitu Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan PD.
- (2) SPPD Walikota/Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (3) SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

- (4) Apabila Ketua DPRD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Wakil Ketua DPRD.
- (5) SPPD Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan PD ditandatangani oleh Walikota.
- (6) Apabila Walikota karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Wakil Walikota.
- (7) SPPD Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Apabila Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Penjabat Sekretaris Daerah.
- (9) Apabila Penjabat Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Asisten.
- (10) SPPD Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf di lingkungan PD ditandatangani oleh Pimpinan PD.
- (11) Apabila Pimpinan PD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas Pimpinan PD.

Pasal 6

SPPD atas pelaksanaan perjalanan dinas harus memperoleh rekomendasi dari instansi yang menjadi tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan, penataran, kursus dan seminar serta lokakarya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia PNS pada masing-masing PD sesuai bidang kewenangannya harus

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alokasi kredit anggarannya dapat berasal PD yang bersangkutan dan/atau dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan uang transportasi.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. uang transportasi hanya diberikan kepada pengemudi yang berstatus PTT dan Pegawai BLUD pada hari libur dalam rangka mengikuti kegiatan Walikota sebesar Rp. 75.000,00 per hari ;
 - b. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/ sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan latihan dengan durasi pelaksanaan lebih dari 5 (lima) jam paling banyak sebesar Rp.75.000,00 per hari;
 - c. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/ sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan latihan dengan durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 per hari;
 - d. uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) hari;
 - e. uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk waktu pelaksanaan lebih dari 5 (lima) hari paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 per hari ;
 - f. uang transportasi selain tersebut pada huruf b sampai dengan huruf d dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 50.000,00.

- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diberikan oleh PD penyelenggara rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan latihan.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan kendaraan umum diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang terdiri dari :
- a. uang transportasi ;
 - b. uang harian ;
 - c. biaya penginapan ; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang terdiri dari :
- a. biaya bahan bakar minyak ;
 - b. uang harian ;
 - c. biaya penginapan ; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf g, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari :
- a. biaya pemetian jenazah ; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 10

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan ;
 - c. biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota dari terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan ke tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. transportasi darat ;
 - b. transportasi udara ; dan/atau
 - c. transportasi laut.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, dan Pegawai BLUD diberikan uang transportasi;
 - b. alat transportasi darat yang digunakan dapat berupa kereta api, bus, travel dan/atau sewa kendaraan;
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama, apabila menggunakan transportasi darat berupa sewa kendaraan atau taksi harus memperhitungkan kapasitas penumpang sehingga setiap orang tidak diperkenankan memperhitungkan sewa kendaraan atau taksi secara terpisah ;
 - d. perkiraan besaran biaya transportasi darat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;
 - e. biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- f. biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota diberikan transportasi udara kelas bisnis;
 - b. perjalanan dinas DPRD, PNS, PTT, pegawai BLUD diberikan transportasi udara kelas ekonomi ;
 - c. perkiraan biaya transportasi udara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini ;
 - d. apabila perkiraan biaya transportasi udara tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, maka biaya transportasi udara dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban sepanjang sesuai kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ;
 - e. biaya transportasi udara dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - f. apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka biaya transportasi udara dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat eselon V, PNS golongan IV, diberikan transportasi kelas eksekutif;
 - b. perjalanan dinas PNS golongan III, PNS golongan II, PNS golongan I, PTT dan pegawai BLUD diberikan transportasi kelas bisnis .

- c. besaran perkiraan biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (6) Biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota ;
 - b. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban ;
 - c. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini ;
 - d. Perjalanan dinas DPRD, PNS, PTT dan pegawai BLUD diberikan biaya taksi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) kali perjalanan dinas ;
 - e. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling banyak 4 (empat) kali yaitu biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal menuju bandara, biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal/bandara keberangkatan menuju hotel/lokasi, biaya taksi kepulangan dari hotel/lokasi menuju stasiun/terminal/bandara dan biaya taksi kepulangan dari bandara menuju stasiun/terminal ;
 - f. Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban;
 - g. Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf ddiberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan harga riil bahan bakar minyak.

- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasi dari kode rekening belanja bahan bakar minyak dan/atau kode rekening belanja perjalanan dinas keluar daerah pada APBD.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang kurang dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang harian yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang kurang dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang harian yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang transportasi dan uang harian.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang harian dan biaya bahan bakar minyak.
- (5) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang harian, uang transportasi dan biaya penginapan.
- (6) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang harian, biaya bahan bakar minyak dan biaya penginapan.
- (7) Apabila perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penginapan ditanggung oleh panitia, maka hanya diberikan uang harian dan uang transportasi/biaya bahan bakar minyak.

- (8) Apabila perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penginapan dan uang transportasi ditanggung oleh panitia, maka hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
 - b. perhitungan uang harian adalah jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - c. uang representasi diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
 - d. perhitungan uang representasi adalah jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - e. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang representasi juga diberikan uang penginapan ;
 - f. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah paling sedikit 1 (satu) ;
 - g. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam

- h. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam 09.00WIB ;
- i. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 19.00 WIB ;
- j. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 19.00WIB ;
- k. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf h harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain : SPTM menggunakan kendaraan dinas berangkat sebelum hari pelaksanaan atau SPTM menggunakan moda transportasi bus berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi kereta api berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi sewa kendaraan berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti penginapan ;
- l. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf i harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain : SPTM menggunakan kendaraan dinas pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau SPTM menggunakan moda transportasi bus pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi kereta api pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi sewa kendaraan pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti

- m. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan dinas ;
 - n. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Pimpinan Perangkat Daerah berhak untuk diberikan uang harian dan uang representasi perjalanan dinas jabatan sesuai dengan jabatan yang diemban.
 - (3) Perjalanan dinas keluar daerah PNS, PTT dan Pegawai BLUD apabila lebih dari 6 (enam) hari dalam satu bulan berturut-turut maupun tidak berturut-turut maka pada hari ke 7 (tujuh) dan seterusnya uang harian dan uang representasi diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang harian dan uang representasi.

Pasal 14

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan harga penginapan.

- (3) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan sesuai harga penginapan dengan model subsidi silang antar pelaksana perjalanan dinas sepanjang total biaya penginapan gabungan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat menunjukkan bukti menginap, diberikan biaya penginapan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara, DPRD dan pegawai dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat negara, DPRD dan pegawai.

Pasal 16

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Besaran biaya pemettian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Biaya pemettian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan secara riil yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (2) Biaya pemettian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas paling tinggi.
- (2) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas paling tinggi.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e adalah pendidikan dan pelatihan dengan waktu pelaksanaan lebih dari 3 (tiga) hari.
- (2) Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini ;

- b. hari keempat dan seterusnya diberikan uang harian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk pejabat negara dan DPRD.

Pasal 22

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f dan huruf g diberikan paling banyak 6 (enam) orang.

Pasal 23

Pejabat Negara, DPRD, ASN, PTT dan Pegawai BLUD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB VI

AKOMODASI

Pasal 24

- (1) Akomodasi diberikan dalam rangka menjalankan tugas daerah yang dibiayai APBD.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat negara diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. istri atau suami pejabat negara, dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah ;
 - c. istri atau suami pejabat negara, dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah ;
 - d. istri atau suami ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah ;

- e. istri atau suami ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah ;
- f. PNS diluar lingkungan Pemerintah Daerah ;
- g. tenaga upahan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- h. masyarakat.

Pasal 25

- (1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang transportasi ;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pejabat negara diluar lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan uangtransportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas pejabat negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. istri atau suami pejabat negara dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian ;
 - c. istri atau suami pejabat negara dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian dan biaya penginapan ;
 - d. istri atau suami ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian ;
 - e. istri atau suami ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian .

- f. PNS diluar lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai golongannya;
- g. tenaga upahan dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas PNS golongan II, PTT dan pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- h. masyarakat dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas PNS golongan II, PTT dan Pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 26

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dalam bentuk uang transportasi diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme Uang Persediaan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Bukti pertanggungjawaban transportasi khusus untuk uang transportasi pengemudi yang berstatus PTT dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas dari Pimpinan PD/dasar pemberian surat perintah tugas; dan
 - b. daftar penerimaan uang transportasi.
- (3) Bukti pertanggungjawaban transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri dari :
 - a. daftar hadir ; dan
 - b. daftar penerimaan uang transportasi.

Pasal 27

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan transportasi, daftar hadir dan daftar nominatif penerimaan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Pasal 28

- (1) Pembayaran perjalanan dinas keluar daerah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung berdasarkan perhitungan rampung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa ;
 - b. bendahara pengeluaran ; atau
 - c. pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, kunjungan kerja, studi banding dan sejenisnya.
- (4) Penyedia jasa untuk perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (5) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (6) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (7) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (8) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (9) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 29

Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. dasar penugasan;
- b. surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;
- c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh instansi yang dikunjungi;
- d. daftar penerimaan uang harian dan/atau uang representasi ;
- e. bukti penginapan ;
- f. bukti tiket transportasi, bukti biaya taksi, bukti biaya sewa kendaraan beserta biaya-biaya yang melekat ;
- g. bukti pembelian BBM ;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Daftar Pengeluaran Riil apabila pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluaran sebagai pengganti bukti transport lokal seperti taksi, ojek, sewa kendaraan dan alat angkutan lainnya.

Pasal 30

Bentuk surat perintah tugas, SPPD, daftar penerimaan uang dan SPTM Daftar Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Akomodasi

Pasal 31

Bukti pertanggungjawaban akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah:

- a. dasar penugasan;
- b. surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang ;
- c. daftar penerimaan uang harian ;
- d. bukti penginapan ; dan
- e. tiket transportasi, sewa kendaraan beserta biaya-biaya yang melekat.

Pasal 32

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan uang akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 15 Maret 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 15 Maret 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 Maret 2018

BATAS MAKSIMAL BESARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PULANG PERGI

| NO | TEMPAT TUJUAN | TARIF |
|----------|----------------------------|--|
| | | EKSEKUTIF |
| | | Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, dan Pegawai BLUD |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Provinsi Jawa Timur | |
| 1 | Ngawi | 200.000 |
| 2 | Magetan | 200.000 |
| 3 | Madiun | 200.000 |
| 4 | Ponorogo | 200.000 |
| 5 | Pacitan | 500.000 |
| 6 | Nganjuk | 300.000 |
| 7 | Trenggalek | 500.000 |
| 8 | Tulungagung | 500.000 |
| 9 | Kediri | 500.000 |
| 10 | Blitar | 500.000 |
| 11 | Jombang | 1.000.000 |
| 12 | Mojokerto | 1.000.000 |
| 13 | Bojonegoro | 1.000.000 |
| 14 | Tuban | 1.000.000 |
| 15 | Lamongan | 1.000.000 |
| 16 | Gresik | 1.000.000 |
| 17 | Surabaya | 1.000.000 |
| 18 | Sidoarjo | 1.000.000 |
| 19 | Pasuruan | 1.000.000 |
| 20 | Malang | 900.000 |
| 21 | Batu | 900.000 |
| 22 | Lumajang | 900.000 |
| 23 | Jember | 1.500.000 |
| 24 | Situbondo | 1.500.000 |
| 25 | Bondowoso | 1.500.000 |
| 26 | Probolinggo | 1.500.000 |
| 27 | Banyuwangi | 1.500.000 |
| 28 | Sampang | 900.000 |
| 29 | Bangkalan | 900.000 |
| 30 | Pamekasan | 900.000 |
| 31 | Sumenep | 900.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------------------------|-----------|
| B | Provinsi Jawa Tengah | |
| 1 | Sragen | 1.000.000 |
| 2 | Wonogiri | 1.000.000 |
| 3 | Solo | 1.000.000 |
| 4 | Karanganyar | 1.000.000 |
| 5 | Boyolali | 1.000.000 |
| 6 | Temanggung | 1.000.000 |
| 7 | Wonosobo | 1.000.000 |
| 8 | Klaten | 1.000.000 |
| 9 | Magelang | 1.000.000 |
| 10 | Purworejo | 1.000.000 |
| 11 | Rembang | 1.000.000 |
| 12 | Kebumen | 1.000.000 |
| 13 | Pemalang | 1.000.000 |
| 14 | Semarang | 1.000.000 |
| 15 | Blora | 1.000.000 |
| 16 | Pati | 1.000.000 |
| 17 | Kendal | 1.000.000 |
| 18 | Kudus | 1.000.000 |
| 19 | Demak | 1.000.000 |
| 20 | Jepara | 1.000.000 |
| 21 | Grobogan | 1.000.000 |
| 22 | Pekalongan | 1.000.000 |
| 23 | Tegal | 1.000.000 |
| 24 | Brebes | 1.000.000 |
| 25 | Cilacap | 1.000.000 |
| 26 | Batang | 1.000.000 |
| 27 | Banyumas | 1.000.000 |
| 28 | Banjarnegara | 1.000.000 |
| 29 | Purbalingga | 1.000.000 |
| C | Provinsi DI Yogyakarta | |
| 1 | Yogyakarta | 1.000.000 |
| 2 | Sleman | 1.000.000 |
| 3 | Kulon Progo | 1.000.000 |
| 4 | Gunung Kidul | 1.000.000 |
| 5 | Bantul | 1.000.000 |
| D | Provinsi Jawa Barat | |
| 1 | Indramayu | 1.300.000 |
| 2 | Cirebon | 1.300.000 |
| 3 | Karawang | 1.300.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 4 | Kuningan | 1.300.000 |
| 5 | Majalengka | 1.300.000 |
| 6 | Purwakarta | 1.300.000 |
| 7 | Subang | 1.300.000 |
| 8 | Ciamis | 1.300.000 |
| 9 | Tasikmalaya | 1.300.000 |
| 10 | Cimahi | 1.300.000 |
| 11 | Bandung | 1.300.000 |
| 12 | Sumedang | 1.300.000 |
| 13 | Sukabumi | 1.300.000 |
| 14 | Garut | 1.300.000 |
| 15 | Cianjur | 1.300.000 |
| 16 | Bekasi | 1.300.000 |
| 17 | Bogor | 1.300.000 |
| 18 | Depok | 1.300.000 |
| E | Provinsi Banten | |
| 1 | Lebak | 1.300.000 |
| 2 | Pandeglang | 1.300.000 |
| 3 | Serang | 1.300.000 |
| 4 | Tangerang | 1.300.000 |
| 5 | Cilegon | 1.300.000 |
| F | Provinsi DKI Jakarta | |
| | Jakarta | 1.300.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 Maret 2018

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)
 (PULANG PERGI)**

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----|------------|----------------|--------------------|------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | JAKARTA | AMBON | 13.285.000 | 7.081.000 |
| 2 | JAKARTA | BALIKPAPAN | 7.412.000 | 3.797.000 |
| 3 | JAKARTA | BANDA ACEH | 7.519.000 | 4.492.000 |
| 4 | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | 2.407.000 | 1.583.000 |
| 5 | JAKARTA | BANJARMASIN | 5.252.000 | 2.995.000 |
| 6 | JAKARTA | BATAM | 4.867.000 | 2.888.000 |
| 7 | JAKARTA | BENGKULU | 4.364.000 | 7.519.000 |
| 8 | JAKARTA | BIAK | 14.065.000 | 3.262.000 |
| 9 | JAKARTA | DENPASAR | 5.305.000 | 3.262.000 |
| 10 | JAKARTA | GORONTALO | 7.231.000 | 4.824.000 |
| 11 | JAKARTA | JAMBI | 4.065.000 | 2.460.000 |
| 12 | JAKARTA | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.193.000 |
| 13 | JAKARTA | JOGYAKARTA | 4.107.000 | 2.268.000 |
| 14 | JAKARTA | KENDARI | 7.658.000 | 4.182.000 |
| 15 | JAKARTA | KUPANG | 9.413.000 | 5.081.000 |
| 16 | JAKARTA | MAKASAR | 7.444.000 | 3.829.000 |
| 17 | JAKARTA | MALANG | 4.599.000 | 2.695.000 |
| 18 | JAKARTA | MAMUJU | 7.295.000 | 4.867.000 |
| 19 | JAKARTA | MANADO | 10.824.000 | 5.102.000 |
| 20 | JAKARTA | MANOKWARI | 16.226.000 | 10.824.000 |
| 21 | JAKARTA | MATARAM | 5.316.000 | 3.230.000 |
| 22 | JAKARTA | MEDAN | 7.252.000 | 3.808.000 |
| 23 | JAKARTA | PADANG | 5.530.000 | 2.952.000 |
| 24 | JAKARTA | PALANGKARAYA | 4.984.000 | 2.984.000 |
| 25 | JAKARTA | PALEMBANG | 3.861.000 | 2.268.000 |
| 26 | JAKARTA | PALU | 9.348.000 | 5.113.000 |
| 27 | JAKARTA | PANGKAL PINANG | 3.412.000 | 2.139.000 |
| 28 | JAKARTA | PEKANBARU | 5.583.000 | 3.016.000 |
| 29 | JAKARTA | PONTIANAK | 4.353.000 | 2.781.000 |
| 30 | JAKARTA | SEMARANG | 3.861.000 | 2.182.000 |
| 31 | JAKARTA | SOLO | 3.861.000 | 2.342.000 |
| 32 | JAKARTA | SURABAYA | 5.466.000 | 2.674.000 |
| 33 | JAKARTA | TERNATE | 10.001.000 | 6.664.000 |
| 34 | JAKARTA | TIMIKA | 13.830.000 | 7.487.000 |
| 35 | AMBON | DENPASAR | 8.054.000 | 4.471.000 |
| 36 | AMBON | JAYAPURA | 7.434.000 | 4.161.000 |
| 37 | AMBON | KENDARI | 4.824.000 | 2.856.000 |
| 38 | AMBON | MAKASAR | 6.022.000 | 3.455.000 |
| 39 | AMBON | MANOKWARI | 5.177.000 | 3.027.000 |
| 40 | AMBON | PALU | 6.140.000 | 3.508.000 |
| 41 | AMBON | SORONG | 3.637.000 | 2.257.000 |
| 42 | AMBON | SURABAYA | 8.803.000 | 4.845.000 |
| 43 | AMBON | TERNATE | 4.022.000 | 2.449.000 |
| 44 | BALIKPAPAN | BANDA ACEH | 12.739.000 | 6.749.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--------------|------------|------------|
| 45 | BALIKPAPAN | BATAM | 10.354.000 | 5.305.000 |
| 46 | BALIKPAPAN | DENPASAR | 10.739.000 | 5.648.000 |
| 47 | BALIKPAPAN | JAYAPURA | 19.071.000 | 10.086.000 |
| 48 | BALIKPAPAN | JOGYAKARTA | 9.669.000 | 4.749.000 |
| 49 | BALIKPAPAN | MAKASAR | 12.664.000 | 6.150.000 |
| 50 | BALIKPAPAN | MANADO | 15.702.000 | 7.295.000 |
| 51 | BALIKPAPAN | MEDAN | 12.493.000 | 6.140.000 |
| 52 | BALIKPAPAN | PADANG | 10.942.000 | 5.369.000 |
| 53 | BALIKPAPAN | PALEMBANG | 9.445.000 | 4.749.000 |
| 54 | BALIKPAPAN | PEKANBARU | 10.996.000 | 5.423.000 |
| 55 | BALIKPAPAN | SEMARANG | 9.445.000 | 4.674.000 |
| 56 | BALIKPAPAN | SOLO | 9.445.000 | 4.813.000 |
| 57 | BALIKPAPAN | SURABAYA | 10.889.000 | 5.113.000 |
| 58 | BALIKPAPAN | TIMIKA | 18.408.000 | 9.445.000 |
| 59 | BANDA ACEH | DENPASAR | 10.835.000 | 6.279.000 |
| 60 | BANDA ACEH | JAYAPURA | 19.167.000 | 10.717.000 |
| 61 | BANDA ACEH | JOGYAKARTA | 9.765.000 | 5.380.000 |
| 62 | BANDA ACEH | MAKASAR | 12.760.000 | 6.781.000 |
| 63 | BANDA ACEH | MANADO | 15.798.000 | 7.926.000 |
| 64 | BANDA ACEH | PONTIANAK | 9.990.000 | 5.840.000 |
| 65 | BANDA ACEH | SEMARANG | 9.530.000 | 5.305.000 |
| 66 | BANDA ACEH | SOLO | 9.530.000 | 5.444.000 |
| 67 | BANDA ACEH | SURABAYA | 10.985.000 | 5.744.000 |
| 68 | BANDA ACEH | TIMIKA | 18.504.000 | 10.076.000 |
| 69 | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN | 8.129.000 | 4.129.000 |
| 70 | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH | 8.225.000 | 4.760.000 |
| 71 | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | 6.193.000 | 3.412.000 |
| 72 | BANDAR LAMPUNG | BATAM | 5.840.000 | 3.316.000 |
| 73 | BANDAR LAMPUNG | BIAK | 14.119.000 | 7.487.000 |
| 74 | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR | 6.236.000 | 3.647.000 |
| 75 | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.097.000 |
| 76 | BANDAR LAMPUNG | JOGYAKARTA | 5.155.000 | 2.760.000 |
| 77 | BANDAR LAMPUNG | KENDARI | 8.354.000 | 4.482.000 |
| 78 | BANDAR LAMPUNG | MAKASAR | 8.161.000 | 4.161.000 |
| 79 | BANDAR LAMPUNG | MALANG | 5.594.000 | 3.134.000 |
| 80 | BANDAR LAMPUNG | MANADO | 11.199.000 | 5.305.000 |
| 81 | BANDAR LAMPUNG | MATARAM | 6.246.000 | 3.626.000 |
| 82 | BANDAR LAMPUNG | MEDAN | 7.979.000 | 4.150.000 |
| 83 | BANDAR LAMPUNG | PADANG | 6.439.000 | 3.380.000 |
| 84 | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA | 5.947.000 | 3.401.000 |
| 85 | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG | 4.931.000 | 2.760.000 |
| 86 | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU | 6.482.000 | 3.433.000 |
| 87 | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK | 5.380.000 | 3.220.000 |
| 88 | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG | 4.931.000 | 2.685.000 |
| 89 | BANDAR LAMPUNG | SOLO | 4.931.000 | 2.824.000 |
| 90 | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA | 6.386.000 | 3.123.000 |
| 91 | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA | 13.905.000 | 7.455.000 |
| 92 | BANDUNG | BATAM | 6.289.000 | 3.583.000 |
| 93 | BANDUNG | DENPASAR | 5.626.000 | 3.252.000 |
| 94 | BANDUNG | JAKARTA | 2.064.000 | 1.476.000 |
| 95 | BANDUNG | JAMBI | 5.006.000 | 2.941.000 |
| 96 | BANDUNG | JOGYAKARTA | 3.369.000 | 2.129.000 |
| 97 | BANDUNG | PADANG | 6.129.000 | 3.508.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|----------------|------------|------------|
| 98 | BANDUNG | PALEMBANG | 4.385.000 | 2.631.000 |
| 99 | BANDUNG | PANGKAL PINANG | 4.599.000 | 2.738.000 |
| 100 | BANDUNG | PEKANBARU | 6.525.000 | 3.701.000 |
| 101 | BANDUNG | SEMARANG | 3.027.000 | 1.957.000 |
| 102 | BANDUNG | SOLO | 3.647.000 | 2.268.000 |
| 103 | BANDUNG | SURABAYA | 4.824.000 | 2.856.000 |
| 104 | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | 4.439.000 | 2.663.000 |
| 105 | BANJARMASIN | BANDA ACEH | 10.792.000 | 6.022.000 |
| 106 | BANJARMASIN | BATAM | 8.407.000 | 4.578.000 |
| 107 | BANJARMASIN | BIAK | 16.686.000 | 8.749.000 |
| 108 | BANJARMASIN | DENPASAR | 8.792.000 | 4.920.000 |
| 109 | BANJARMASIN | JAYAPURA | 17.135.000 | 9.359.000 |
| 110 | BANJARMASIN | JOGYAKARTA | 7.723.000 | 4.022.000 |
| 111 | BANJARMASIN | MEDAN | 10.546.000 | 5.412.000 |
| 112 | BANJARMASIN | PADANG | 9.006.000 | 4.642.000 |
| 113 | BANJARMASIN | PALEMBANG | 7.498.000 | 4.022.000 |
| 114 | BANJARMASIN | PEKANBARU | 9.049.000 | 4.696.000 |
| 115 | BANJARMASIN | SEMARANG | 7.498.000 | 3.958.000 |
| 116 | BANJARMASIN | SOLO | 7.498.000 | 4.097.000 |
| 117 | BANJARMASIN | SURABAYA | 8.942.000 | 4.385.000 |
| 118 | BANJARMASIN | TIMIKA | 16.472.000 | 8.717.000 |
| 119 | BATAM | BANDA ACEH | 10.439.000 | 5.936.000 |
| 120 | BATAM | DENPASAR | 8.450.000 | 4.824.000 |
| 121 | BATAM | JAYAPURA | 16.782.000 | 9.263.000 |
| 122 | BATAM | JOGYAKARTA | 7.370.000 | 3.936.000 |
| 123 | BATAM | MAKASAR | 10.375.000 | 5.337.000 |
| 124 | BATAM | MANADO | 13.413.000 | 6.482.000 |
| 125 | BATAM | MEDAN | 10.193.000 | 5.316.000 |
| 126 | BATAM | PADANG | 8.653.000 | 4.546.000 |
| 127 | BATAM | PALEMBANG | 7.145.000 | 3.936.000 |
| 128 | BATAM | PEKANBARU | 8.707.000 | 4.599.000 |
| 129 | BATAM | PONTIANAK | 7.594.000 | 4.396.000 |
| 130 | BATAM | SEMARANG | 7.145.000 | 3.861.000 |
| 131 | BATAM | SOLO | 7.145.000 | 4.000.000 |
| 132 | BATAM | SURABAYA | 8.600.000 | 4.300.000 |
| 133 | BATAM | TIMIKA | 16.119.000 | 8.621.000 |
| 134 | BENGKULU | PALEMBANG | 2.899.000 | 1.893.000 |
| 135 | BIAK | BALIKPAPAN | 18.622.000 | 9.477.000 |
| 136 | BIAK | BANDA ACEH | 18.718.000 | 10.108.000 |
| 137 | BIAK | BATAM | 16.333.000 | 8.664.000 |
| 138 | BIAK | DENPASAR | 16.729.000 | 8.995.000 |
| 139 | BIAK | JAYAPURA | 3.615.000 | 2.321.000 |
| 140 | BIAK | JOGJAKARTA | 15.648.000 | 8.108.000 |
| 141 | BIAK | MANADO | 11.734.000 | 6.353.000 |
| 142 | BIAK | MEDAN | 18.472.000 | 9.498.000 |
| 143 | BIAK | PADANG | 16.932.000 | 8.728.000 |
| 144 | BIAK | PALEMBANG | 15.424.000 | 8.108.000 |
| 145 | BIAK | PEKANBARU | 16.985.000 | 8.381.000 |
| 146 | BIAK | PONTIANAK | 15.873.000 | 8.568.000 |
| 147 | BIAK | SURABAYA | 12.782.000 | 7.081.000 |
| 148 | BIAK | TIMIKA | 5.808.000 | 3.444.000 |
| 149 | DENPASAR | JAYAPURA | 11.680.000 | 6.845.000 |
| 150 | DENPASAR | KUPANG | 5.091.000 | 2.952.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|--------------|------------|-----------|
| 151 | DENPASAR | MAKASSAR | 4.182.000 | 2.631.000 |
| 152 | DENPASAR | MANADO | 7.851.000 | 4.278.000 |
| 153 | DENPASAR | MATARAM | 1.840.000 | 1.390.000 |
| 154 | DENPASAR | MEDAN | 10.589.000 | 5.658.000 |
| 155 | DENPASAR | PADANG | 9.049.000 | 4.888.000 |
| 156 | DENPASAR | PALANGKARAYA | 8.557.000 | 4.909.000 |
| 157 | DENPASAR | PALEMBANG | 7.541.000 | 4.278.000 |
| 158 | DENPASAR | PEKANBARU | 9.092.000 | 4.942.000 |
| 159 | DENPASAR | PONTIANAK | 7.990.000 | 4.738.000 |
| 160 | DENPASAR | TIMIKA | 10.140.000 | 6.129.000 |
| 161 | JAMBI | BALIKPAPAN | 7.733.000 | 4.407.000 |
| 162 | JAMBI | BANJARMASIN | 7.690.000 | 4.193.000 |
| 163 | JAMBI | DENPASAR | 7.733.000 | 4.439.000 |
| 164 | JAMBI | JOGJAKARTA | 6.653.000 | 3.551.000 |
| 165 | JAMBI | KUPANG | 11.434.000 | 6.075.000 |
| 166 | JAMBI | MAKASSAR | 9.659.000 | 4.952.000 |
| 167 | JAMBI | MALANG | 7.091.000 | 3.925.000 |
| 168 | JAMBI | MANADO | 12.707.000 | 6.097.000 |
| 169 | JAMBI | PALANGKARAYA | 7.444.000 | 4.193.000 |
| 170 | JAMBI | PONTIANAK | 6.878.000 | 4.011.000 |
| 171 | JAMBI | SEMARANG | 6.428.000 | 3.476.000 |
| 172 | JAMBI | SOLO | 6.428.000 | 3.615.000 |
| 173 | JAMBI | SURABAYA | 7.883.000 | 3.915.000 |
| 174 | JAYAPURA | JOGJAKARTA | 13.274.000 | 7.690.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Maret 2018

BIAYA TRANSPORTASI LAUT

| NO | Jabatan | Kelas | Biaya Angkutan |
|-----------|--|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Walikota | Eksekutif | tarif sesuai kenyataan |
| 2 | Wakil Walikota | Eksekutif | tarif sesuai kenyataan |
| 3 | Sekretaris Daerah/Ketua DPRD | Eksekutif | tarif sesuai kenyataan |
| 4 | Eselon II b | Eksekutif | tarif sesuai kenyataan |
| 5 | Wakil Ketua / Anggota DPRD | Eksekutif | tarif sesuai kenyataan |
| 6 | Eselon III, IV, V dan Golongan IV | Eksekutif | tarif sesuai kenyataan |
| 7 | Staf Golongan III, II, I, PTT dan Pegawai BLUD | Bisnis | tarif sesuai kenyataan |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

BESARAN UANG HARIAN

| NO | TEMPAT TUJUAN | UANG HARIAN | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------|---------|
| | | Pejabat Negara | | Pejabat Stuktural (Eselon) | | | | Staf/Gol | | | |
| | | Walikota | Wakil Walikota | II a | II b | III | IV dan V | IV | III | II, I, PTT dan GTT | Sopir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | Provinsi Jawa Timur | | | | | | | | | | |
| 1 | Ngawi | 750.000 | 660.000 | 600.000 | 540.000 | 480.000 | 420.000 | 360.000 | 360.000 | 300.000 | 150.000 |
| 2 | Magetan | 750.000 | 660.000 | 600.000 | 540.000 | 480.000 | 420.000 | 360.000 | 360.000 | 300.000 | 150.000 |
| 3 | Ponorogo | 750.000 | 660.000 | 600.000 | 540.000 | 480.000 | 420.000 | 360.000 | 360.000 | 300.000 | 150.000 |
| 4 | Madiun | 750.000 | 660.000 | 600.000 | 540.000 | 480.000 | 420.000 | 360.000 | 360.000 | 300.000 | 150.000 |
| 5 | Nganjuk | 750.000 | 660.000 | 600.000 | 540.000 | 480.000 | 420.000 | 360.000 | 360.000 | 300.000 | 150.000 |
| 6 | Pacitan | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 7 | Trenggalek | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 8 | Tulungagung | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 9 | Kediri | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 10 | Bojonegoro | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 11 | Tuban | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 12 | Blitar | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 13 | Jombang | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 14 | Mojokerto | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 15 | Lamongan | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 16 | Gresik | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 17 | Surabaya | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 18 | Sidoarjo | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 19 | Pasuruan | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 20 | Malang | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 21 | Batu | 1.500.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 960.000 | 840.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 300.000 |
| 22 | Lumajang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 23 | Jember | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 24 | Situbondo | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 25 | Bondowoso | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 26 | Probolinggo | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 27 | Banyuwangi | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 28 | Sampang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 29 | Bangkalan | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 30 | Pamekasan | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 31 | Sumenep | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| B | Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | | | |
| 1 | Sragen | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 250.000 |
| 2 | Wonogiri | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 250.000 |
| 3 | Solo | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 250.000 |
| 4 | Karanganyar | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 250.000 |
| 5 | Boyolali | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 250.000 |
| 6 | Temanggung | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 7 | Wonosobo | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 8 | Klaten | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 300.000 |
| 9 | Magelang | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 10 | Purworejo | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 11 | Rembang | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 12 | Kebumen | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 13 | Pemalang | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 14 | Semarang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 300.000 |
| 15 | Blora | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 16 | Pati | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |

| NO | TEMPAT TUJUAN | UANG HARIAN | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| | | Pejabat Negara | | Pejabat Stuktural (Eselon) | | | | Staf/Gol | | | |
| | | Walikota | Wakil Walikota | II a | II b | III | IV dan V | IV | III | II, I, PTT dan GTT | Sopir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | Kendal | 1.750.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 300.000 |
| 18 | Kudus | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 19 | Demak | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 20 | Jepara | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 21 | Grobogan | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 22 | Pekalongan | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 23 | Tegal | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 24 | Brebes | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 25 | Cilacap | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 26 | Batang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 27 | Banyumas | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 28 | Banjarnegara | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 29 | Purbalingga | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| C | Provinsi DI Yogyakarta | | | | | | | | | | |
| 1 | Yogyakarta | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 2 | Sleman | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 3 | Kulon Progo | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 4 | Gunung Kidul | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 5 | Bantul | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| D | Provinsi Jawa Barat | | | | | | | | | | |
| 1 | Indramayu | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 2 | Cirebon | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 3 | Karawang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 4 | Kuningan | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 5 | Majalengka | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 6 | Purwakarta | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 7 | Subang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 8 | Ciamis | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 9 | Tasikmalaya | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 10 | Cimahi | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 11 | Bandung | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 12 | Sumedang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 13 | Sukabumi | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 14 | Garut | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 15 | Cianjur | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 16 | Bekasi | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 17 | Bogor | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 18 | Depok | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| E | Provinsi Banten | | | | | | | | | | |
| 1 | Lebak | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 2 | Pandeglang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 3 | Serang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 4 | Tangerang | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| 5 | Cilegon | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | 400.000 |
| F | Propinsi DKI Jakarta | | | | | | | | | | |
| | Jakarta | 2.250.000 | 1.980.000 | 1.800.000 | 1.620.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 900.000 | 500.000 |
| G | Provinsi Luar Pulau Jawa | | | | | | | | | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussa | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 2 | Sumatra Utara | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 3 | Riau | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |

| NO | TEMPAT TUJUAN | UANG HARIAN | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| | | Pejabat Negara | | Pejabat Stuktural (Eselon) | | | | Staf/Gol | | | |
| | | Walikota | Wakil Walikota | II a | II b | III | IV dan V | IV | III | II, I, PTT dan GTT | Sopir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Jambi | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 6 | Sumatra Barat | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 7 | Sumatra Selatan | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 8 | Lampung | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 9 | Bengkulu | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 10 | Bangka Belitung | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 11 | Bali | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 14 | Kalimantan Barat | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 17 | Kalimantan Timur | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 18 | Kalimantan Utara | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 19 | Sulawesi Utara | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 20 | Gorontalo | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 21 | Sulawesi Barat | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 22 | Sulawesi Selatan | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 25 | Maluku | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 26 | Maluku Utara | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 27 | Papua | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 28 | Irian Barat | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

BIAYA PENGINAPAN

| NO | TEMPAT TUJUAN | BIAYA PENGINAPAN | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| | | Pejabat Negara | | Pejabat Struktural | | | Staf/Gol | | |
| | | Walikota | Wakil Walikota | DPRD dan Eselon II | Eselon III | Eselon IV dan V | Gol IV | Gol III | Gol II, I, PTT, Pegawai BLUD |
| | | Bintang V | Bintang V | Bintang IV | Bintang III | Bintang III | Bintang II | Bintang II | Bintang I |
| | | Suite | Delux | Delux | Delux | Standar | Standar | Standar | Standar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Provinsi Jawa Timur | | | | | | | | |
| 1 | Ngawi | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 2 | Magetan | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 3 | Ponorogo | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 4 | Nganjuk | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 5 | Pacitan | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 6 | Trenggalek | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 7 | Tulungagung | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 8 | Kediri | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 9 | Bojonegoro | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 10 | Tuban | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 11 | Blitar | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 12 | Jombang | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 13 | Mojokerto | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 14 | Lamongan | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 15 | Gresik | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 16 | Surabaya | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 17 | Sidoarjo | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 18 | Pasuruan | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 19 | Malang | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 20 | Batu | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 21 | Lumajang | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 22 | Jember | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 23 | Situbondo | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 24 | Bondowoso | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 25 | Probolinggo | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 26 | Banyuwangi | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 27 | Sampang | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 28 | Bangkalan | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 29 | Pamekasan | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| 30 | Sumenep | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 329.000 |
| B | Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | |
| 1 | Sragen | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 2 | Wonogiri | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 3 | Solo | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 4 | Karanganyar | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 5 | Boyolali | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 6 | Temanggung | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 7 | Wonosobo | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 8 | Klaten | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 9 | Magelang | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 10 | Purworejo | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 11 | Rembang | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 12 | Kebumen | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 13 | Pemalang | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 14 | Semarang | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 15 | Blora | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 16 | Pati | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 17 | Kendal | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 18 | Kudus | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 19 | Demak | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 20 | Jepara | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 21 | Grobogan | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 22 | Pekalongan | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 23 | Tegal | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 24 | Brebes | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 25 | Cilacap | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 26 | Batang | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 27 | Banyumas | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 28 | Banjarnegara | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| 29 | Purbalingga | 4.146.000 | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 350.000 |
| C Provinsi Yogyakarta | | | | | | | | | |
| 1 | Yogyakarta | 4.620.000 | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 461.000 |
| 2 | Sleman | 4.620.000 | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 461.000 |
| 3 | Kulon Progo | 4.620.000 | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 461.000 |
| 4 | Gunung Kidul | 4.620.000 | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 461.000 |
| 5 | Bantul | 4.620.000 | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 461.000 |
| D Provinsi Jawa Barat | | | | | | | | | |
| 1 | Indramayu | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 2 | Cirebon | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 3 | Karawang | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 4 | Kuningan | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 5 | Majalengka | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 6 | Purwakarta | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 7 | Subang | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 8 | Ciamis | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 9 | Tasikmalaya | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 10 | Cimahi | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 11 | Bandung | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 12 | Sumedang | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 13 | Sukabumi | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 14 | Garut | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 15 | Cianjur | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 16 | Bekasi | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| 17 | Bogor | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 18 | Depok | 3.664.000 | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 463.000 |
| E | Provinsi Banten | | | | | | | | |
| 1 | Lebak | 3.808.000 | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 400.000 |
| 2 | Pandeglang | 3.808.000 | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 400.000 |
| 3 | Serang | 3.808.000 | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 400.000 |
| 4 | Tangerang | 3.808.000 | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 400.000 |
| 5 | Cilegon | 3.808.000 | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 400.000 |
| F | Provinsi DKI Jakarta | | | | | | | | |
| | Jakarta | 8.720.000 | 8.720.000 | 1.086.000 | 800.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 400.000 |
| G | Provinsi Luar Pulau Jawa | | | | | | | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 4.420.000 | 4.420.000 | 1.308.000 | 1.080.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 370.000 |
| 2 | Sumatra Utara | 4.960.000 | 4.960.000 | 1.214.000 | 703.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 310.000 |
| 3 | Riau | 3.817.000 | 3.817.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 380.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | 4.275.000 | 4.275.000 | 1.285.000 | 650.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 280.000 |
| 5 | Jambi | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.176.000 | 697.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 290.000 |
| 6 | Sumatra Barat | 4.240.000 | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 477.000 | 477.000 | 477.000 | 370.000 |
| 7 | Sumatra Selatan | 4.680.000 | 4.680.000 | 1.228.000 | 605.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 310.000 |
| 8 | Lampung | 3.960.000 | 3.960.000 | 1.299.000 | 790.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 356.000 |
| 9 | Bengkulu | 1.300.000 | 1.300.000 | 790.000 | 712.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 510.000 |
| 10 | Bangka Belitung | 3.335.000 | 3.335.000 | 1.310.000 | 850.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 304.000 |
| 11 | Bali | 4.881.000 | 4.881.000 | 1.810.000 | 1.304.000 | 904.000 | 904.000 | 904.000 | 658.000 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 3.429.000 | 3.429.000 | 1.268.000 | 737.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 360.000 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 400.000 |
| 14 | Kalimantan Barat | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.130.000 | 866.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 361.000 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.596.000 | 923.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 436.000 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 4.250.000 | 4.250.000 | 1.679.000 | 816.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 379.000 |
| 17 | Kalimantan Timur | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.596.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 450.000 |
| 18 | Sulawesi Utara | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549.000 | 549.000 | 549.000 | 342.000 |
| 19 | Gorontalo | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.134.000 | 910.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 240.000 |
| 20 | Sulawesi Barat | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.030.000 | 910.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 360.000 |
| 21 | Sulawesi Selatan | 4.820.000 | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539.000 | 539.000 | 539.000 | 378.000 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493.000 | 493.000 | 493.000 | 389.000 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.070.000 | 802.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 420.000 |
| 24 | Maluku | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.030.000 | 680.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 414.000 |
| 25 | Maluku Utara | 3.110.000 | 3.110.000 | 1.512.000 | 600.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 380.000 |
| 26 | Papua | 2.850.000 | 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 414.000 |
| 27 | Irian Barat | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.482.000 | 976.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 370.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

DAFTAR BESARAN UANG REPRESENTASI

| NO | KOTA TUJUAN | BESARAN UANG REPRESENTASI | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| | | Pejabat Negara | | Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah | Wakil Ketua DPRD | Anggota DPRD dan Eselon IIB |
| | | Walikota | Wakil Walikota | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Provinsi Jawa Timur | | | | | |
| 1 | Ngawi | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 2 | Magetan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 3 | Ponorogo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 4 | Pacitan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 5 | Nganjuk | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 6 | Trenggalek | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 7 | Tulungagung | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 8 | Kediri | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 9 | Blitar | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 10 | Jombang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 11 | Mojokerto | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 12 | Bojonegoro | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 13 | Tuban | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 14 | Lamongan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 15 | Gresik | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 16 | Surabaya | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 17 | Sidoarjo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 18 | Pasuruan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 19 | Malang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 20 | Batu | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 21 | Lumajang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 22 | Jember | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 23 | Situbondo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 24 | Bondowoso | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 25 | Probolinggo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 26 | Banyuwangi | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 27 | Sampang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 28 | Bangkalan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 29 | Pamekasan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 30 | Sumenep | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| B | Provinsi Jawa Tengah | | | | | |
| 1 | Sragen | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 2 | Wonogiri | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3 | Solo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 4 | Karanganyar | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 5 | Boyolali | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 6 | Temanggung | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 7 | Wonosobo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 8 | Klaten | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 9 | Magelang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 10 | Purworejo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 11 | Rembang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 12 | Kebumen | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 13 | Pemalang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 14 | Semarang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 15 | Blora | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 16 | Pati | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 17 | Kendal | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 18 | Kudus | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 19 | Demak | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 20 | Jepara | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 21 | Grobogan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 22 | Pekalongan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 23 | Tegal | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 24 | Brebes | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 25 | Cilacap | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 26 | Batang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 27 | Banyumas | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 28 | Banjarnegara | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 29 | Purbalingga | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| C Provinsi DI Yogyakarta | | | | | | |
| 1 | Yogyakarta | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 2 | Sleman | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 3 | Kulon Progo | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 4 | Gunung Kidul | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 5 | Bantul | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| D Provinsi Jawa Barat | | | | | | |
| 1 | Indramayu | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 2 | Cirebon | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 3 | Karawang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 4 | Kuningan | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 5 | Majalengka | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 6 | Purwakarta | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 7 | Subang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 8 | Ciamis | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 9 | Tasikmalaya | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 10 | Cimahi | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 11 | Bandung | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 12 | Sumedang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 13 | Sukabumi | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 14 | Garut | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 | Cianjur | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 16 | Bekasi | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 17 | Bogor | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 18 | Depok | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| E | Provinsi Banten | | | | | |
| 1 | Lebak | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 2 | Pandeglang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 3 | Serang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 4 | Tangerang | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| 5 | Cilegon | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| F | Provinsi DKI Jakarta | | | | | |
| | Jakarta | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |
| G | Provinsi Luar Jawa | | | | | |
| | Luar Jawa | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Maret 2018

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| NO | Jabatan | Biaya Pemetian | Biaya Angkutan |
|-----------|--|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Walikota | 5.000.000 | tarif sesuai kenyataan |
| 2 | Wakil Walikota | 4.500.000 | tarif sesuai kenyataan |
| 3 | Sekretaris Daerah/Ketua DPRD | 4.500.000 | tarif sesuai kenyataan |
| 4 | Eselon II b | 3.000.000 | tarif sesuai kenyataan |
| 5 | Wakil Ketua / Anggota DPRD | 3.000.000 | tarif sesuai kenyataan |
| 6 | Eselon III, IV, V dan Golongan IV | 2.500.000 | tarif sesuai kenyataan |
| 7 | Staf Golongan III, II, I, PTT dan pegawai BLUD | 2.000.000 | tarif sesuai kenyataan |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL :15 Maret 2018

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | TEMPAT TUJUAN | BIAYA TAKSI | |
|----|---------------------|-------------|---------|
| | | Satuan | Biaya |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | A c e h | Orang/ Kali | 123.000 |
| 2 | Sumatera Utara | Orang/ Kali | 232.000 |
| 3 | R i a u | Orang/ Kali | 70.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | Orang/ Kali | 105.000 |
| 5 | J a m b i | Orang/ Kali | 128.000 |
| 6 | Sumatera Barat | Orang/ Kali | 192.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | Orang/ Kali | 124.000 |
| 8 | Lampung | Orang/ Kali | 148.000 |
| 9 | Bengkulu | Orang/ Kali | 92.000 |
| 10 | Bangka Belitung | Orang/ Kali | 86.000 |
| 11 | B a n t e n | Orang/ Kali | 320.000 |
| 12 | Jawa Barat | Orang/ Kali | 118.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta | Orang/ Kali | 200.000 |
| 14 | Jawa Tengah | Orang/ Kali | 150.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | Orang/ Kali | 141.000 |
| 16 | Jawa Timur | Orang/ Kali | 150.000 |
| 17 | B a l i | Orang/ Kali | 160.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/ Kali | 218.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/ Kali | 81.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | Orang/ Kali | 145.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Orang/ Kali | 94.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Orang/ Kali | 141.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Orang/ Kali | 401.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | Orang/ Kali | 353.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | Orang/ Kali | 310.000 |
| 26 | Gorontalo | Orang/ Kali | 134.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | Orang/ Kali | 217.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | Orang/ Kali | 128.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | Orang/ Kali | 151.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Orang/ Kali | 332.000 |
| 31 | M a l u k u | Orang/ Kali | 340.000 |
| 32 | Maluku Utara | Orang/ Kali | 403.000 |
| 33 | P a p u a | Orang/ Kali | 354.000 |
| 34 | Papua Barat | Orang/ Kali | 130.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH,M.Hum.

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 Maret 2018

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

| NO | TEMPAT TUJUAN | BIAYA SEWA KENDARAAN | |
|----|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Satuan | Roda 4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | A c e h | Per hari | 3.500.000 |
| 2 | Sumatera Utara | Per hari | 3.500.000 |
| 3 | R i a u | Per hari | 3.500.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | Per hari | 3.500.000 |
| 5 | J a m b i | Per hari | 3.500.000 |
| 6 | Sumatera Barat | Per hari | 3.500.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | Per hari | 3.500.000 |
| 8 | Lampung | Per hari | 3.500.000 |
| 9 | Bengkulu | Per hari | 3.500.000 |
| 10 | Bangka Belitung | Per hari | 3.500.000 |
| 11 | B a n t e n | Per hari | 3.500.000 |
| 12 | Jawa Barat | Per hari | 3.500.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta | Per hari | 3.500.000 |
| 14 | Jawa Tengah | Per hari | 3.500.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | Per hari | 3.500.000 |
| 16 | Jawa Timur | Per hari | 3.500.000 |
| 17 | B a l i | Per hari | 3.500.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Per hari | 3.500.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Per hari | 3.500.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | Per hari | 3.500.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Per hari | 3.500.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Per hari | 3.500.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Per hari | 3.500.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | Per hari | 3.500.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | Per hari | 3.500.000 |
| 26 | Gorontalo | Per hari | 3.500.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | Per hari | 3.500.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | Per hari | 3.500.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | Per hari | 3.500.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Per hari | 3.500.000 |
| 31 | M a l u k u | Per hari | 3.500.000 |
| 32 | Maluku Utara | Per hari | 3.500.000 |
| 33 | P a p u a | Per hari | 3.500.000 |
| 34 | Papua Barat | Per hari | 3.500.000 |

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Maret 2018

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :.....
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI
PERINTAH

NAMA

Surat Perintah Tugas No. :

| No | Tanggal Pelaksanaan Tugas | Instansi yang dituju | Tanda Tangan dan stempel |
|----|---------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tgl.....sd..... | | Kepala..... Stempel* Nama NIP |
| 2 | Tgl.....sd..... | | Kepala..... Stempel* Nama NIP |
| 3 | Tgl.....sd..... | | Kepala..... Stempel* Nama NIP |
| 4 | Tgl.....sd..... | | Kepala..... Stempel* Nama NIP |

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

**PEJABAT PEMBERI
PERINTAH**

NAMA

Keterangan:

* apabila ada stempel, apabila tidak ada cukup ditandatangani oleh instansi/orang yang dikunjungi

B. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR BIAYA PENERIMAAN TRANSPORTASI

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORTASI

| No | Nama | Jabatan | Gol | Jumlah hari | Biaya Transportasi | Jumlah | Tanda Tangan |
|-----------------------|------|---------|-----|----------------|-----------------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |
| 1. 2. 3. dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama bendahara
NIP bendahara

C. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

| No. | Nama | Jabatan/ Pangkat | Instansi | Tanda Tangan |
|------------------------|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1. 2. 3. dst. | | | | |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD

Alamat.....
TeleponFax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

B. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MADIUN NAMA SKPD

Alamat.....

Telepon Fax

Website <http://www.madiunkota.go.id>

Lembarke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pejabat yang memberi perintah | Jabatan yang memberi perintah |
| 2. Nama Pegawai yang diperintah | |
| 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan | |
| 4. Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5. Alat angkut yang dipergunakan | |
| 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | |
| 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | |
| 8. Pengikut | |
| 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| 10. Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di :

pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

**NAMA
Pangkat
NIP**

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-------|----------------|---|-------|
| I. | Tiba di | : | | Berangkat dari | : | |
| | Pada tanggal | : | | Ke | : | |
| | Kepala | : | | Pada tanggal | : | |
| | | | | Kepala | : | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------|----------------|---|-------|
| II. | Tiba di | : | | Berangkat dari | : | |
| | Pada tanggal | : | | Ke | : | |
| | Kepala | : | | Pada tanggal | : | |
| | | | | Kepala | : | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------|----------------|---|-------|
| III | Tiba di | : | | Berangkat dari | : | |
| | Pada tanggal | : | | Ke | : | |
| | Kepala | : | | Pada tanggal | : | |
| | | | | Kepala | : | |

IV. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA
Pangkat
NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

C. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD

DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD

| No | Nama | Jabatan | Gol | Biaya Transport | | Uang Harian | Biaya Penginapan | Uang Representasi | Lain-lain | Jumlah | Tanda Tangan |
|-----------------------|------|---------|-----|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | | BBM | Transport | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $11 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9$ | 10 |
| 1. 2. 3. dst | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | |

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar, tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama Bendahara
NIP Bendahara

E. CONTOH PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
TeleponFax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)
DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomortanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpotasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|------------|
| 1. | Bus Madiun - Surabaya | 18.000,00 |
| 2. | Biaya taksi dari terminal Bungurasih menuju BPKAD Propinsi Jawa Timur | 90.000,00 |
| 3. | Biaya taksi dari lokasi BPKAD Propinsi Jawa Timur ke terminal Bungurasih | 95.000,00 |
| 4. | Bus Madiun – Surabaya | 18.000,00 |
| | Jumlah | 221.000,00 |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening kas umum daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Kepala SKPD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPP

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
TeleponFax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

KEPALAKOTA MADIUN

NAMA

B. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG AKOMODASI

DAFTAR PENERIMAAN UANG AKOMODASI

| No | Nama | Jabatan | Gol | Biaya Transport | | Uang Harian | Biaya Penginapan | Lain-lain | Jumlah | Tanda Tangan |
|-----------------------|------|---------|-----|-----------------|-----------|-------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | BBM | Transport | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+6+7+8+9 | 11 |
| 1. 2. 3. Dst | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | |

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas di bayar, tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama Bendahara
NIP Bendahara

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.